

ANALISIS KARAKTERISTIK DAN TINGKAT PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN

Ulul Hidayah¹⁾

¹⁾ Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka
e-mail: ulul-hidayah@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

It is necessary to optimize the potential of rural areas in the Pandeglang Regency to increase development and reduce the poverty level of the population. The development of local potential is needed to encourage economic growth in rural areas. One of the efforts conducted is through establishing and managing Village Own Enterprises (Badan Usaha Milik Desa-BUMDes). This study aims to identify the characteristics and level of development of BUMDes in the Pandeglang Regency. The analytical method used to describe the characteristics of BUMDes in the Pandeglang Regency is descriptive qualitative analysis. A composite index analysis was used to identify the level of development of BUMDes. This study uses secondary data from the Department of Community and Village Development of Pandeglang Regency. The results of this study conclude that the characteristics of BUMDes in Pandeglang Regency vary according to the contribution to Village Own-source Revenue (Pendapatan Asli Desa-PADes), capital, turnover, profit, number of employees, age, and the number and type of business units. Most of the development levels of BUMDes are in the low and medium categories. Furthermore, around 57 BUMDes are included in the high category with the following characteristics that have existed for more than five years, have an average number of employees of nine people, having more than two business units, and an average profile of more than 5 million per year.

Keywords: BUMDes, Characteristics, Development Level, Rural Development.

ABSTRAK

Diperlukan optimalisasi potensi kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Pengembangan potensi lokal diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan. Salah upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendirian dan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan indeks komposit. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan BUMDes dilakukan dengan analisis indeks komposit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang beragam dilihat dari kontribusi terhadap PADes, modal, omzet, profit, jumlah karyawan, usia, serta jumlah dan jenis unit usaha. Sebagian besar tingkat perkembangan BUMDes termasuk dalam kategori rendah dan sedang. Dan sekitar 57 BUMDes termasuk dalam kategori tinggi dengan karakteristik berikut telah berdiri lebih dari 5 tahun, memiliki jumlah karyawan rata-rata 9 orang, memiliki lebih dari 2 unit usaha dan memiliki rata-rata profil lebih dari 5 juta per tahun.

Kata kunci: BUMDes, Karakteristik, Pembangunan Perdesaan, Tingkat Perkembangan.

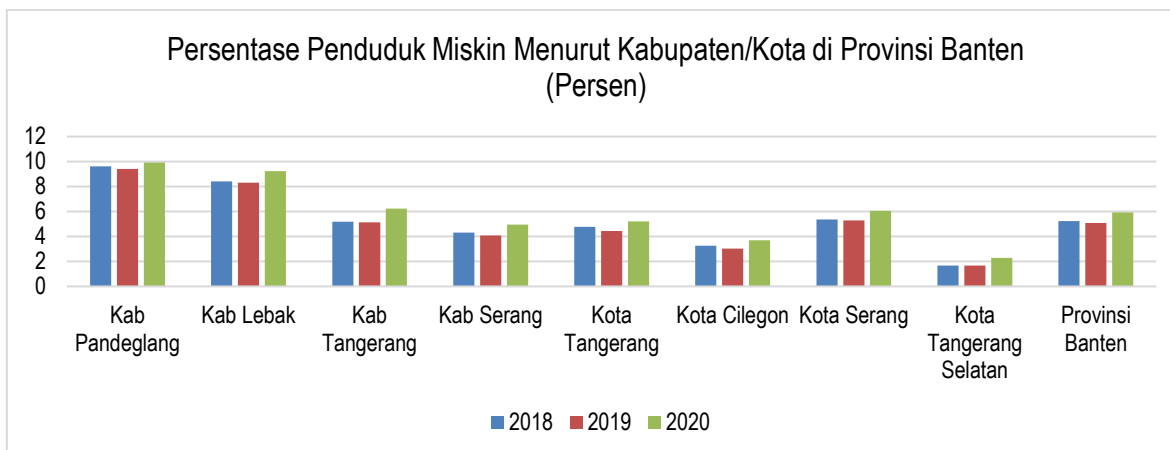
Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat memiliki aturan yang berlaku pada suatu wilayah dengan batas tertentu, memiliki kewenang dalam mengelolah urusan pemerintah, mengakomodir kebutuhan masyarakat secara partisipatif, serta mengatur hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Sebagai satuan politik terkecil pemerintah, desa memiliki berbagai potensi sumber daya diantaranya sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam, dan sumber daya finansial yang diperoleh dari APBN. Jika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan maksimal maka akan mampu mencapai tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan.

Kekuatan pembangunan di tingkat desa telah diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini merupakan pedoman tertulis dalam membangun sistem otonomi desa yang memberikan kewenangan pemerintah desa untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didasarkan pada keputusan bersama dalam memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah (Murwadi *et al.*, 2017). Pembangunan nasional merupakan hasil integrasi dari pembangunan-pembangunan di desa yang serasi, terpadu, berdaya guna serta berhasil guna, oleh karena itu pembangunan perdesaan perlu memiliki perhatian yang khusus (Adisasmita, 2006). Muta'ali (2016) mendefinisikan pembangunan di perdesaan merupakan upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya desa guna tercapainya pembangunan yang sejahtera, adil, mandiri, merata dan berkelanjutan.

Tantangan dalam pembangunan desa yang sering dihadapi adalah terkait dengan tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan, terjadinya kegagalan transformasi dan melemahnya kelembagaan lokal masyarakat perdesaan. Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat, aksesibilitas dan kesempatan terhadap faktor produksi (Nugroho & Dahuri, 2004). Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dibutuhkan lima hal mendasar yang menjadi pondasi pembangunan perdesaan. Kelima hal tersebut yaitu; a) pengembangan klaster; b) daya saing wilayah; c) pelibatan berbagai stakeholder; d) kebijakan pembangunan yang sesuai karakteristik wilayah; dan e) kewirausahaan sosial (Budiharsono, 2018).

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten dengan karakteristik wilayah perdesaan yang luas. Dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan terbagi menjadi 326 desa dan 12 kelurahan. Artinya Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan perdesaan yakni sebesar 96% dengan potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sektor pertanian. Adapun produksi di sektor pertanian adalah padi, jagung dan kedelai. Menurut data BPS, produksi padi di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 mencapai 877.087 ton, produksi kedelai mencapai 80.911 ton dan produksi kedelai sebesar 947 ton.

Berdasarkan data peringkat IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Pandeglang tahun 2020 masih ada sebanyak empat desa yang masuk kategori Sangat Tertinggal (1,2%), 124 desa dengan kategori desa Tertinggal (36,6%), 188 desa yang Berkembang (55,4%), 22 desa Maju (6,5%), dan hanya ada satu desa saja yang termasuk kategori desa Mandiri (0,3%). Kemudian jika dilihat dari tingkat kemiskinan penduduk, Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten dengan tingkat persentase penduduk miskinnya paling tinggi di Provinsi Banten (Gambar 1). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 mencapai 9,61%, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 9,42%. Namun di tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan hingga 9,92%. Kondisi kemiskinan tersebut terjadi pada wilayah-wilayah perdesaan.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)

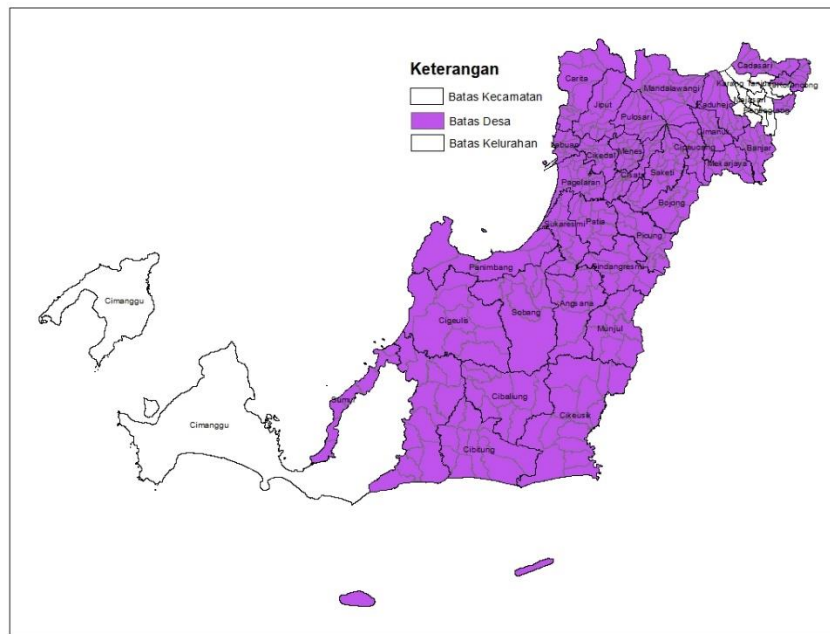
Diperlukan optimalisasi potensi wilayah perdesaan di Kabupaten Pandeglang guna dapat meningkatkan pembangunan perdesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk perdesaan. Upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan telah didukung dengan pendanaan yang kuat yaitu melalui dana desa. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya telah diatur dalam Peraturan Menteri, salah satunya digunakan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola secara sinergitas oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa. Pengembangan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan modal sosial dan daya tawar kolektif masyarakat perdesaan (Murwadi *et al.*, 2017). Sebagai sebuah lembaga ekonomi perdesaan, BUMDes memiliki berbagai peran diantaranya (a) menyediakan peminjaman modal usaha kecil masyarakat/ petani sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk yang terjerat rentenir; (b) mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan; (c) memiliki *multiplier effect* yang luas; serta (d) BUMDes mampu memberi kontribusi terhadap PADes sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih banyak (Gunawan, 2011).

Desa memiliki modal manusia dan modal sosial yang baik untuk dapat menunjang pembangunan desa (Rahman *et al.*, 2020). Masyarakat desa memiliki berbagai karakteristik yang khas yang membedakan dengan masyarakat perkotaan. Pertama, masyarakat perdesaan umumnya memiliki modal sosial yang kuat dengan karakteristik swadaya, solidaritas, dan gotong royong tanpa mengenal SARA. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintah desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang memproduksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa. Karakteristik kehidupan diperdesaan inilah yang menjadi salah satu landasan dalam pendirian BUMDes (Prasetyo, 2019). Kabupaten Pandeglang terdiri dari 326 desa yang seluruhnya telah memiliki BUMDes. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan maka artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan menilai tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada 326 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang (Gambar 2). Variabel dalam penelitian ini meliputi kontribusi BUMDes terhadap PAD, modal BUMDes, omzet BUMDes, profit

BUMDes, jumlah Karyawan, lama BUMDes didirikan, serta jumlah unit usaha, yang diperoleh dari Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis indeks komposit. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang.



Gambar 2. Lokasi Penelitian

Dalam mengidentifikasi tipologi perkembangan BUMDes dilakukan dengan analisis indeks komposit. Indeks komposit merupakan suatu ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dari pengukuran terhadap variabel observasi yang berada pada suatu area tertentu (OECD, 2008). Penyusunan indeks digunakan untuk menganalisa perubahan kinerja yang disusun dari berbagai variabel penelitian pada periode tertentu yang bersifat multidimensi (Faradis & Afifah, 2019). Penyusunan indeks komposit memungkinkan untuk dapat melihat nilai kinerja pembangunan atau program serta digunakan sebagai dasar penentuan prioritas kebijakan. Adapun langkah-langkah dalam menghitung tingkat perkembangan BUMDes adalah sebagai berikut:

- (1) *Theoretical Framework*; fase ini membangun kerangka berpikir dan membuat kombinasi dari berbagai variabel yang mungkin untuk digunakan dalam pembentukan indeks komposit sesuai tujuan yang diinginkan,
- (2) Seleksi Data; data yang digunakan adalah data yang terukur, memiliki relevansi dengan fenomena yang akan diteliti dan memperhatikan jika terjadi kelangkaan data,
- (3) Normalisasi data indikator; normalisasi data menggunakan teknik *max-min*,

$$X^* = \frac{(X - \min_x)}{(-\min_x)}$$

Keterangan:

X^* = Nilai data setelah dinormalisasi

X = Data sebelum dinormalisasi

\min_x = nilai minimum dari data perkolom

\max_x = nilai maksimum dari data perkolom

- (4) Menghitung bobot setiap indikator melalui Analisis Faktor. Nilai bobot diperoleh dari nilai faktor loading.
- (5) Menghitung indeks komposit dengan menggunakan *Additive Aggregation Model*.

$$IA = \sum_{q=1}^q Rank_{qc}$$

Keterangan:

IA = Index Additive

q = variabel yang telah terstandarisasi

- (6) Klasterisasi hasil indeks melalui metode distribusi normal dan dibagi atas 3 kelas.
 - Interval kategori tinggi jika nilai indeks lebih kecil dari rata-rata indeks - 1/2 Standar deviasi
 - Interval kategori sedang jika rata-rata indeks - 1/2 Standar deviasi < indeks < rata-rata indeks + 1/2 Standar deviasi
 - Interval kategori rendah jika nilai indeks lebih besar dari rata-rata indeks + 1/2 Standar deviasiss

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang

1. Produk Unggulan Desa

Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Dalam pendiriannya, unit-unit usaha BUMDes harus dibentuk atas dasar kebutuhan dan potensi desa. Pemilihan unit usaha BUMDes juga harus memprioritaskan jenis usaha yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti penyediaan sarana air bersih; pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat; serta penyediaan sarana komunikasi dan mobilitas untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa. Potensi desa yang dapat dikembangkan oleh BUMDes adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh desa, baik sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia serta berbagai usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa yang belum optimal (Gunawan, 2011).

Desa-desa di Kabupaten Pandeglang memiliki potensi yang bervariasi, setiap desa memiliki produk unggulan desa yang berbeda-beda. Produk unggulan desa di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah air bersih, bata merah, galian c, kerajinan tangan, aneka olahan kripik dan krupuk, makanan kecil, kompos, pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya ikan, olahan ikan, dan olahan minyak. Produk unggulan yang hampir ada di setiap desa adalah produk di bidang pertanian yang dimiliki oleh 134 desa, masyarakat desa menjual produk pertanian berupa padi dan pada beberapa desa sudah dilakukan pengolahan sehingga menjual produk dalam

bentuk beras. Potensi unggulan tertinggi kedua yaitu aneka olahan makanan ringan yang dimiliki oleh 56 desa. Olahan makanan ringan ini berupa olahan krupuk dan kripik misalnya emping, enyene, kripik pisang, kripik singkong, kripik tutung, dan kripik drokdok, yang mana bahan baku produksinya memanfaatkan hasil bumi masyarakat. Adapun penjelasan detail produk unggulan desa di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produk Unggulan Desa di Kabupaten Pandeglang

| Produk Unggulan | Jumlah Desa |
|--------------------------------|-------------|
| Air Bersih | 1 |
| Bata Merah | 2 |
| Galian C | 1 |
| Kerajinan Tangan | 28 |
| Aneka Olahan Kripik dan Krupuk | 56 |
| Makanan Kecil | 42 |
| Kompos | 12 |
| Pertanian | 134 |
| Perkebunan | 14 |
| Peternakan | 6 |
| Budidaya Ikan | 7 |
| Olahan Ikan | 19 |
| Olahan Minyak | 4 |

Produk unggulan desa merupakan sumber daya lokal baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang menjadi kelebihan utama dengan desa lainnya. Produk unggulan desa ini adalah poros kegiatan yang perlu dilembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan (Pradani, 2020). Setidaknya setiap desa memiliki satu produk unggulan desa yang dapat digunakan sebagai motor penggerak ekonomi desa. Konsep ini disebut dengan strategi *One Village One Product* (OVOP). Dalam upaya mendorong desa mandiri ekonomi konsep tersebut dapat direalisasikan melalui kelembagaan BUMDes untuk mendorong terciptanya produk desa yang berkualitas dengan pemasaran yang lebih luas.

2. Lama Usaha

Kebijakan pendirian BUMDes pada setiap desa di Kabupaten Pandeglang mengacu pada Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kebijakan tersebut menjadi dasar untuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menghimbau seluruh desa membentuk pendirian BUMDes untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Pada tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang hanya ada satu desa yang mulai membentuk BUMDes, yaitu Desa Kupahandap yang membentuk BUMDes Mandiri. Inisiatif Desa Kupahandap ini kemudian memotivasi desa-desa lainnya untuk membentuk BUMDes. Selanjutnya dengan diinisiasi kebijakan pemerintah tersebut mendorong berkembangnya 47 BUMDes di Kabupaten Pandeglang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pandeglang terus mendorong pembentukan BUMDes di setiap desa, hingga

tahun 2017 setiap desa di Kabupaten Pandeglang telah mempunyai BUMDes. Berdasarkan data dari DPMD Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes telah berumur empat tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Usia BUMDes di Kabupaten Pandeglang

| Usia BUMDes (tahun) | Jumlah Desa |
|---------------------|-------------|
| 4 | 165 |
| 5 | 113 |
| 6 | 47 |
| 7 | 1 |

3. Jumlah Karyawan

Salah satu parameter keberhasilan BUMDes adalah adanya penciptaan lapangan kerja. Semakin banyak dan semakin luas unit usaha yang dikembangkan oleh suatu BUMDes maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerjanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahyuningtyas (2021) bahwa BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya peluang usaha ekonomi produktif, penyerapan tenaga kerja desa, membangun jejaring usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memiliki kontribusi terhadap PADes. BUMDes dapat merekrut karyawan sendiri, lalu karyawan tersebut akan dibayar dengan cara honorer sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sesuai kesepakatan. Di Kabupaten Pandeglang sendiri rata-rata jumlah karyawan sebanyak 8 orang setiap BUMDes. Jumlah karyawan BUMDes paling sedikit 4 orang dan paling banyak 12 orang yang terdapat pada tujuh desa. Jenis usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang banyak adalah unit usaha bank sampah, fotocopy dan ATK, serta keuangan (Tabel 3). Banyaknya jumlah karyawan yang terserap pada suatu unit usaha BUMDes dipengaruhi oleh skala usaha dan jangkauan pelayanan/pemasaran.

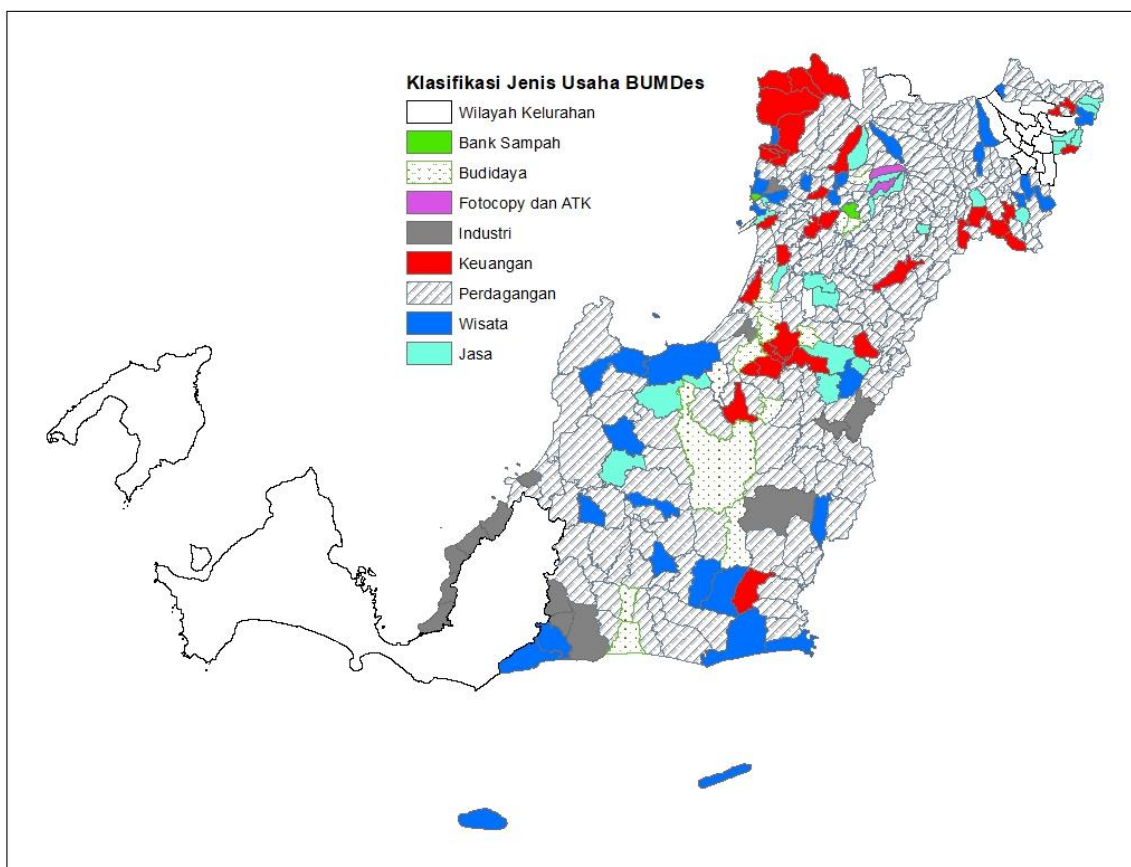
Tabel 3. Jumlah Karyawan berdasarkan Jenis Usaha BUMDes

| Jenis Usaha | Jumlah Karyawan | | |
|------------------|-----------------|-----|-----------|
| | Min | Max | Rata-Rata |
| Bank Sampah | 9 | 9 | 9 |
| Budidaya | 4 | 12 | 8 |
| Fotocopy dan ATK | 8 | 10 | 9 |
| Industri | 4 | 12 | 8 |
| Jasa | 6 | 10 | 8 |
| Keuangan | 6 | 10 | 9 |
| Perdagangan | 4 | 12 | 8 |
| Wisata | 4 | 10 | 8 |

4. Jumlah dan Jenis Unit Usaha

BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang memiliki jenis usaha yang cukup beragam. Rata-rata setiap BUMDes memiliki dua jenis unit usaha. Paling banyak satu BUMDes memiliki

empat unit usaha dan paling sedikit satu BUMDes memiliki satu unit usaha. Adapun BUMDes yang memiliki empat unit usaha diantaranya adalah BUMDes Tunas Jaya di Desa Ujungjaya dan BUMDes Karya Cimanuk Mandiri di Desa Cimanuk. Adapun jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang terdapat berbagai jenis diantaranya; perdagangan, jasa, industri pengolahan, pariwisata, budidaya, bank sampah, fotocopy dan Alat Tulis Kantor (ATK), serta jasa keuangan (Gambar 3).



Gambar 1. Sebaran Unit Usaha BUMDes di Kabupaten Pandeglang

Dominasi jenis unit usaha yang dikembangkan BUMDesa di Kabupaten Pandeglang adalah perdagangan, hal ini karena relatif mudah dalam pengelolaannya baik dari sisi sumber daya manusia maupun kebermanfaatan usaha. Pemilihan bentuk unit usaha harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa, serta disesuaikan dengan potensi desa. Sehingga jika usaha-usaha tersebut dijakankan maka akan dapat menimbulkan permintaan di pasar dan keberadaan badan usaha tersebut dapat dikontrol secara bersama-sama oleh masyarakat (Ridlwan, 2014). Berikut uraian dari masing-masing unit usaha.

1. Perdagangan

Pada unit usaha perdagangan BUMDes mengusahakan kegiatan jual beli hasil produk-produk UMKM dan jual beli kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, gas LPG, hingga

menjual bahan bangunan. Pada unit usaha ini juga menjual berbagai jenis hasil produksi UMKM masyarakat seperti hasil bumi seperti beras, gabah, gula merah, buah-buahan, dan ikan. Selain itu, beberapa BUMDes juga menjual sarana produksi pertanian (saprota) seperti pupuk dan alat-alat pertanian. BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang yang memiliki unit usaha ini ada 209 BUMDes, yang mana 40 persennya menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan jangkauan pemasaran hanya untuk melayani kebutuhan dalam satu desa. Sedangkan 60 persennya menjual hasil bumi yang dipasarkan hingga keluar daerah.

Adanya unit usaha tersebut diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena biasanya masyarakat desa perlu datang ke kota untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga. Mengingat jarak dari desa ke kota cukup jauh maka BUMDes membuka usaha warung serba ada ini. Selain itu jenis usaha ini dirintis untuk lebih mawadahi produk UMKM yang ada di desa-desa Provinsi Banten dan membantu memasarkannya. Menurut Hidayah (2019) sinergisitas yang baik antara UMKM dan BUMDes dapat membantu meningkatkan ekonomi perdesaan, melalui peningkatan kapasitas masyarakat pelaku UMKM, pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Budidaya

Di Kabupaten Pandeglang setidaknya ada 15 BUMDes yang memiliki unit usaha dibidang budidaya baik pertanian, perikanan, maupun peternakan. Berbagai ragam kegiatan budidaya diusahakan oleh masing-masing BUMDes, diantaranya: budidaya padi, jamur tiram, tanaman hortikultura, peternakan domba, ayam petelur, jangkrik, serta perikanan ikan tawar. Beberapa BUMDes bahkan memiliki penggilingan padi sendiri. Sebagai wilayah perdesaan dengan sumber daya alam yang sangat subur maka pembentukan unit usaha ini dapat mendukung usaha pertanian warga.

Pengembangan unit usaha dibidang budidaya sektor pertanian sudah seharusnya menjadi prioritas. Hal ini karena memang dari segi kebijakan dalam berbagai dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Pandeglang mulai dari RPJP, RPJMD, hingga RKPD semua mengarah ke pengembangan sektor pertanian (Wahyuni *et al.*, 2018). Hasil penelitian Putri *et al.*, (2019) juga menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang mempunyai daya saing tertinggi untuk komoditi tanaman pangan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Potensi ketersediaan lahan di Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan budidaya sektor pertanian masih cukup luas. Setidaknya ada sekitar 31% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang yang berupa lahan kehutanan, persawahan dan perkebunan besar yaitu seluas 86.517,33 Ha (Sumantri *et al.*, 2021).

3. Jasa

Berdasarkan Permendes PDDT No 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa BUMDes dapat membentuk usaha penyewaan. Usaha penyewaan (*renting*) barang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dapat mengembangkan berbagai jenis usaha jasa seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan perkakas pesta dan penyewaan sarana olahraga. Di Kabupaten Pandeglang setidaknya ada 24 BUMDes yang memiliki unit usaha bergerak di bidang penyewaan yang terdiri dari penyewaan alat pesta, panggung, alat bangunan, alat menjahit, alat pertanian dan penyewaan lapangan olahraga. Dari berbagai jenis usaha penyewaan yang dikembangkan oleh BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang, penyewaan alat pesta paling

mendominasi. Pemasaran dari produk jasa ini tidak hanya melayani desa tersebut, namun juga desa-desa di sekitarnya.

4. Keuangan

Pada saat ini pembayaran online menjadi metode pembayaran yang cukup efektif dan mudah dalam aktivitas pembayaran tagihan rumah tangga seperti pulsa, paket data, pembayaran listrik, PAM, kirim uang, dan tagihan-tagihan lainnya. Jenis usaha ini juga dapat dilakukan oleh BUMDes dalam pelayanannya pada masyarakat. Di Kabupaten Pandeglang terdapat 29 BUMDes yang memiliki unit usaha ini. Dalam menjalankan unit usaha ini BUMDes-BUMDes tersebut bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai agen dari BRI Link. Selain itu di Kabupaten Pandeglang terdapat dua BUMDes yang menjalankan usahanya di bidang simpan pinjam.

5. Pariwisata

Kabupaten Pandeglang memiliki banyak potensi sumber daya alam, sumber daya alam, kebudayaan dan lokasi serta bentang alam yang indah untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Potensi sumber daya alam seperti pantai, gunung, hutan, sungai, air terjun, dan juga embung, menjadi potensi emas yang mampu diolah untuk kepentingan masyarakat. Terdapat 29 BUMDes yang memiliki unit usaha di sektor pariwisata. Sebanyak 13 diantaranya menjalankan unit usaha wisata embung, 9 BUMDes menjalankan usaha wisata desa dengan atraksi pengenalan budidaya dan kebudayaan di perdesaan, 2 BUMDes menjalankan unit usaha wisata air, 2 BUMDes menjalankan unit usaha wisata religi, dan 3 BUMDes menjalankan unit usaha wisata pantai.

Dengan adanya unit usaha ini diharapkan memberikan efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya yang ada di desa. Semakin banyak investasi di desa wisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sehingga, pengangguran dapat diminimalisir dan pendapatan masyarakat diperkirakan akan terus meningkat (Wahyundaria & Sunarta, 2020). Menurut Hermawan, (2016) pengembangan wisata desa akan berdampak pada perkembangan ekonomi lokal perdesaan seperti peningkatan penghasilan, lapangan kerja, pendapatan daerah, dan kontrol masyarakat dalam kepemilikan aset. Namun di sisi lain dengan adanya pengembangan desa wisata ini dapat berdampak kurang baik pada peningkatan sampah dari kegiatan wisata dan juga mempercepat peningkatan area terbangun untuk kegiatan wisata. Sehingga hal ini membutuhkan kontrol yang baik dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat melalui kebijakan-kebijakan yang melibatkan masyarakat.

6. Industri

Industri pengolahan yang dikembangkan oleh beberapa BUMDes di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah pengolahan ikan laut, gula semut, madu, kerupuk dan kerajinan anyaman. Terdapat 14 BUMDes yang memiliki unit usaha tersebut. Bahan baku produksi dari unit usaha industri pengolahan tersebut memanfaatkan bahan baku lokal. BUMDes dengan unit usaha ini mampu menyerap tenaga kerja paling banyak di antara unit usaha lainnya, rata-rata unit usaha industri pengolahan menyerap tenaga kerja 8 orang.

7. Bank Sampah

Unit usaha pengelolaan sampah dibentuk sebagai upaya masyarakat yang telah sadar bahwa sampah dapat dikelola menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat diolah kembali menjadi berbagai kerajinan seperti tas, taplak meja, dan kerajinan lainnya. Usaha ini

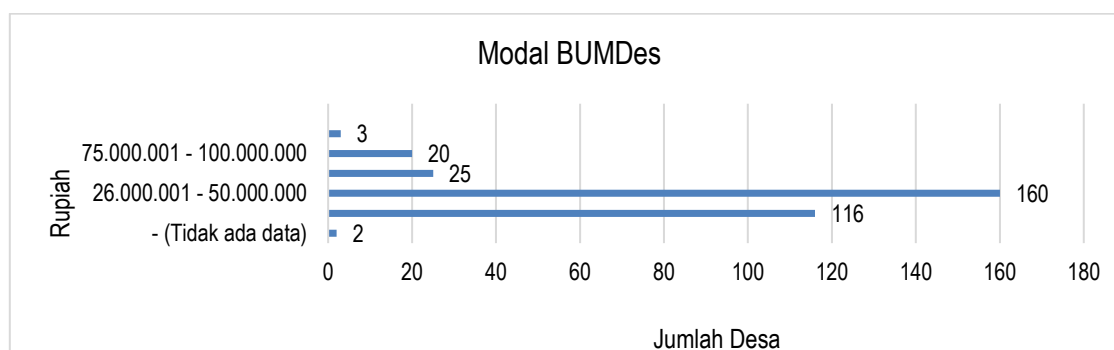
dibentuk untuk memberdayakan masyarakat desa sehingga mempunyai penghasilan tambahan. Selain itu dengan adanya pengelolaan sampah yang baik diharapkan lingkungan menjadi lebih bersih, indah dan sehat. Di Kabupaten Pandeglang terdapat 2 BUMDes yang memiliki unit usaha pengolahan sampah yaitu BUMDes Tunas Bahari di Desa Teluk dan BUMDes Menes Barokah di Desa Menes.

8. Fotocopy dan ATK

Di Kabupaten Pandeglang terdapat dua BUMDes yang menjalankan usaha Jasa fotocopy dan menjual Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu BUMDes Gemilang d Desa Banjarnegara dan BUMDes Sanghai Berkah di Desa Sanghai Dengdek. Usaha ini dipilih karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus membawa salinan dokumen atau kebutuhan alat tulis di sekitar daerah perkantoran desa dan sekolah. Kondisi seperti ini memberikan peluang BUMDes untuk membuka usaha fotocopy dan penyediaan ATK. Selain itu jauhnya jarak lokasi fotocopy dari desa menjadi alasan penguat bahwa usaha ini memiliki peluang yang cukup besar dalam BUMDes. Jangkauan pelayanan dari usaha ini adalah masyarakat dalam desa sendiri.

5. Modal

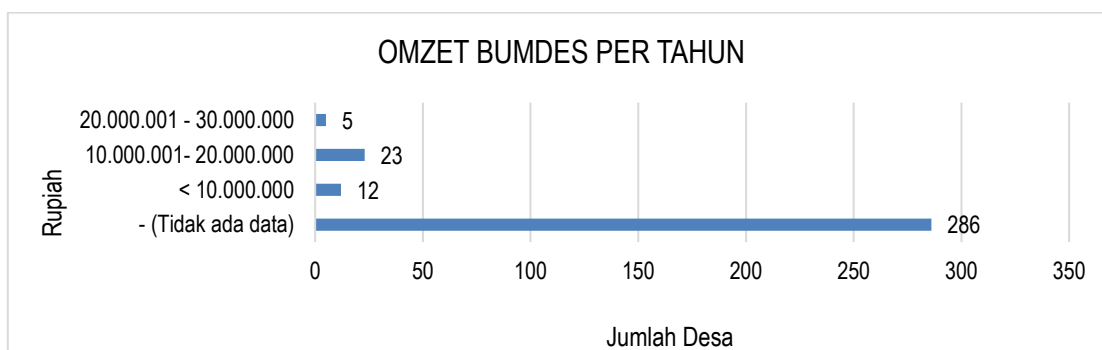
Penggunaan Dana Desa di dalam prespektif sebagian besar masyarakat desa adalah untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dana desa dapat berpeluang lebih bermanfaat jika digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti membentuk BUMDes. Menurut Permendes PDDT No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa permodalan BUMDes dapat berasal dari APBDes, hibah dari pihak swasta, bantuan pemerintah pusat atau daerah, kerjasama usaha dari pihak swasta, aset desa, tabungan dan atau simpanan masyarakat. Sumber permodalan utama pada seluruh BUMDes di Kabupaten Pandeglang diperoleh dari dana desa. Rata-rata modal untuk mendirikan usaha BUMDes di Kabupaten Pandeglang adalah Rp. 37.772.082.00 (Gambar 4). Modal terbesar dimiliki oleh BUMDes Tunas Jaya Desa Ujung Jaya Kecamatan Sumur yaitu sebesar Rp. 986.400.000,00 dengan produk unggulan desa yaitu madu hutan dengan unit usaha BRI Link, sewa traktor, gas LPG. Kedua terbesar ada dari BUMDes Sekar Mayang Desa Sukasari Kecamatan Pulosari dengan produk unggulan desa yaitu padi dan unit usaha simpan pinjam dan BRI link dengan modal sebesar Rp. 115.000.000,00.



Gambar 2. Rata-Rata Modal usaha BUMDes di Kabupaten Pandeglang

6. Omzet

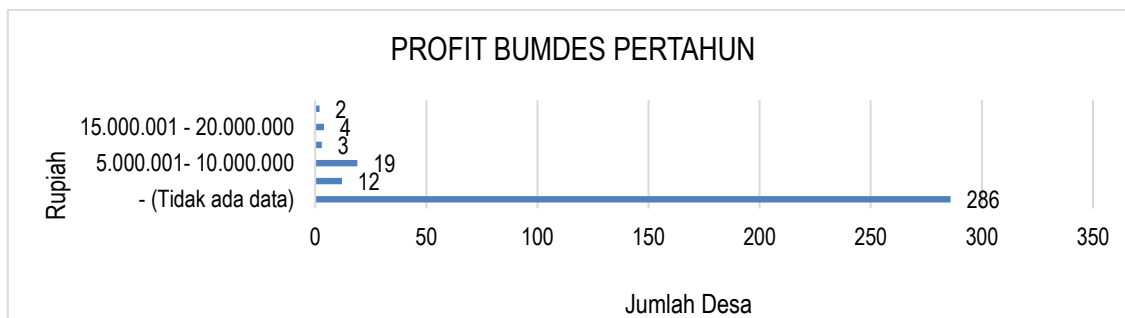
Omzet atau yang sering juga disebut pendapatan kotor adalah hasil penjualan suatu usaha dalam periode tertentu yang di mana total pendapatan tersebut belum dikurangi biaya-biaya apapun, termasuk biaya kebutuhan operasional. Omzet yang besar menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dikelolah memiliki skala usaha yang besar. Hal ini memungkinkan untuk memberikan manfaat positif yang lebih besar pada kegiatan ekonomi desa. Omzet tertinggi diperoleh BUMDes Batu Bantar Berkah, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk dengan produk unggulan desa yaitu beras dan unit usaha beras, gas LPG dan sembako yaitu Rp. 30.000.000,00 per tahun (Gambar 5.). Kemudian disusul oleh omzet dari BUMDes Karya Cimanuk Mandiri, desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk sebesar Rp. 28.000.000,00 per tahun dengan produk unggulan beras hitam dan unit usaha BRI LINK, pengelolaan sampah, bank sampah, distributor sembako. Kunci sukses BUMDes yang memiliki omzet tinggi adalah memiliki lebih dari tiga unit usaha.



Gambar 3. Rata-rata Omzet BUMDes/tahun di Kabupaten Pandeglang

7. Profit

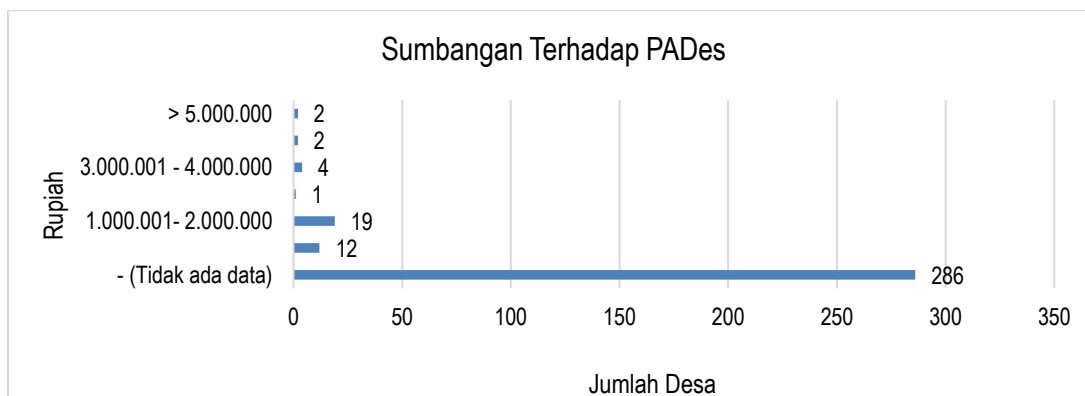
Profit atau keuntungan merupakan pendapatan bersih dari suatu usaha atau jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan dalam periode tertentu sesudah dikurangi biaya-biaya apapun, termasuk biaya kebutuhan operasional (Candraningsih *et al.*, 2019). Profit akan diperoleh ketika BUMDes menjalankan berbagai unit usaha yang dimilikinya serta mampu menciptakan manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi (Faedlulloh, 2018). Peningkatan aktivitas ekonomi pada tingkat perdesaan akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah, yang secara agregat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan Negara. BUMDes di Kabupaten Pandeglang rata-rata memiliki profit sebesar 8.181.512,00 per tahun (Gambar 6.). BUMDes yang menghasilkan profit paling besar yaitu BUMDes Batu Bantar Berkah, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk sebesar Rp. 22.150.000,00 dengan produk unggulan desa yaitu padi dan unit usaha beras, gas LPG dan sembako. Besarnya profit tersebut menunjukkan manfaat ekonomi dari aktivitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pandeglang.



Gambar 4. Rata-Rata Profit BUMDes/tahun di Kabupaten Pandeglang

8. Sumbangan PADes

Sesuai dengan Permendes PD TT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes memiliki peran penting bagi upaya peningkatan PADes. BUMDes merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai upaya peningkatan perekonomian desa sehingga dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat desa. PADes dapat digunakan untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Hasil usaha desa yang bersumber dari BUMDes merupakan jenis pendapatan asli desa yang diharapkan memiliki proporsi terbesar dalam sumber pendapatan desa sehingga tercapai kemandirian desa (Putri *et al.*, 2019). BUMDes di Kabupaten Pandeglang rata-rata memberikan sumbangan ke dalam Pendapatan Asli Desa berkisar antara Rp. 450.000,00 hingga Rp.1.500.000,00 pertahun. Sumbangan tertinggi dari BUMDes ke PADes sebesar RP.5.760.000,00, yaitu dari BUMDes Karya Cimanuk Mandiri, Kecamatan Cimanuk dan BUMDes Batu Bantar Berkah, Kecamatan Batu Bantar.



Gambar 5. Sumbangan BUMDes ke PADes di Kabupaten Pandeglang

Tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang

BUMDes sebagai suatu lembaga usaha yang modalnya dimiliki oleh desa dari berbagai sumber yang sah dan digunakan dalam jasa pelayanan masyarakat, pengelolaan asset desa, serta berbagai jenis usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan BUMDes secara nasional setiap tahun selalu meningkat. Begitupun pada jumlah BUMDes di Kabupaten Pandeglang yang selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga pada 2017 seluruh desa telah membentuk BUMDes.

Di Kabupaten Pandeglang, dari 326 desa tersebut dapat dipastikan semuanya sudah membentuk BUMDES sesuai arahan Bupati Pandeglang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa BUMDES yang belum berjalan secara optimal (Abdurrohman *et al.*, 2020). Keberhasilan BUMDes dapat diukur dengan mengevaluasi dari proses pembentukan dan proses pelaksanaan (Hidayah *et al.*, 2019). Evaluasi proses pembentukan dinilai dari ada tidaknya kegiatan sosialisasi BUMDes, musyawarah desa dan penetapan peraturan desa sebagai legalitas suatu Lembaga. Sedangkan evaluasi pelaksanaan BUMDes dinilai dari besaran omzet, banyaknya jumlah karyawan, besaran sumbangan terhadap PADes, serta adanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat setempat.

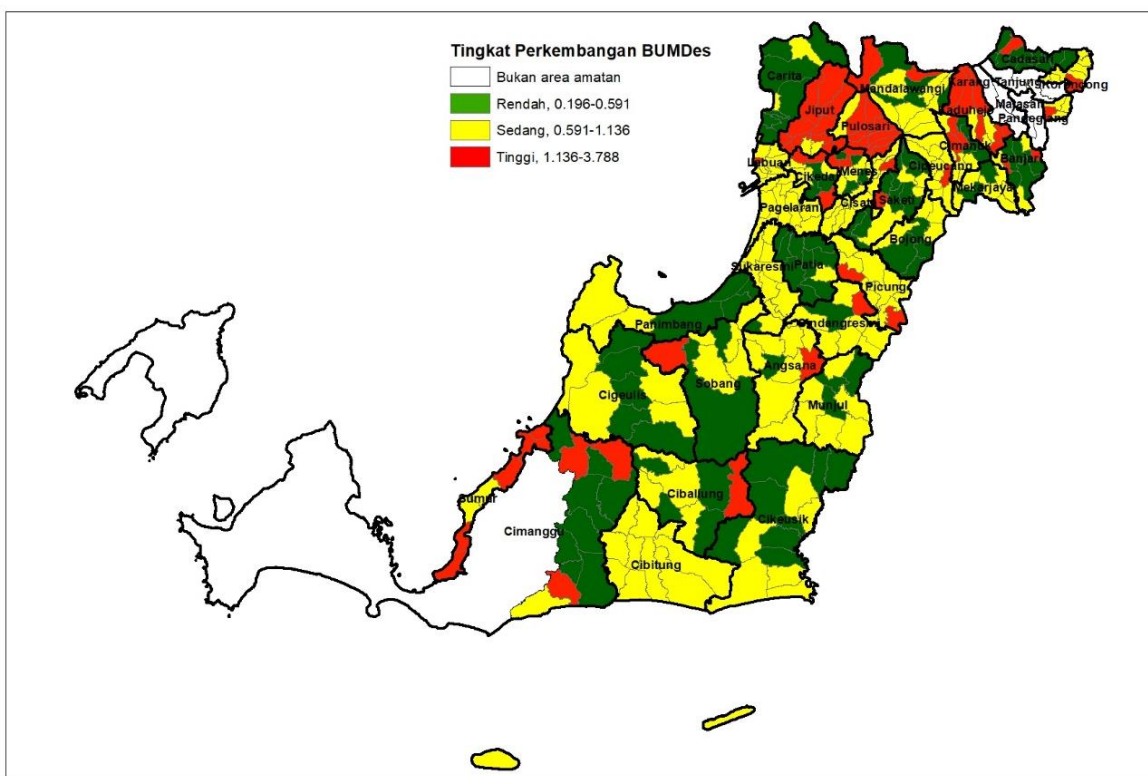
Adapun proporsi tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang mengacu pada teori distribusi normal dapat dikategorikan menjadi 3 tingkat (Tabel 3). Tingkat perkembangan BUMDes tinggi diperoleh oleh BUMDes-BUMDes dengan rentang nilai 3.788-1.136. BUMDes dengan tingkat perkembangan sedang memiliki rentann nilai 0.591-1.136. Sedangkan BUMDes dengan tingkat perkembangan rendah adalah BUMDes-BUMDes dengan rentang nilai 0.196-0.591. BUMDes dengan tingkat kinerja paling rendah adalah BUMDes Utama Perkasa Desa Kaudela dan BUMDes Tapos Tunas Jayadi Desa Tapos. Sedangkan BUMDes dengan tingkat perkembangan paling tinggi adalah BUMDes Karya Cimanuk Mandiri Desa Cimanuk. BUMDes Karya Cimanuk Mandiri telah berdiri dari tahun 2017 dengan memperkerjakan 7 karyawan di unit usaha jual beli hasil bumi.

Tabel 4. Pengkategorisasian Tingkat Perkembangan BUMDes Berdasarkan Distribusi Normal.

| Tingkat Perkembangan BUMDes | Jumlah Desa | Prosentase |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Rendah | 111 | 34% |
| Sedang | 142 | 44% |
| Tinggi | 72 | 22% |

Desa-desanya dengan tingkat perkembangan BUMDes yang rendah memiliki ciri-ciri diantaranya: (a) memiliki usia organisasi yang kurnag dari 5 tahun; (b) memiliki jumlah karyawan 6 orang pada setiap BUMDes; (c) memiliki 1-2 unit usaha; (d) belum menghasilkan profit . Untuk desa-desanya dengan tingkat perkembangan BUMDes sedang memiliki ciri-ciri yaitu rata-rata lama BUMDes didirikan adalah 5 tahun, rata-rata memiliki jumlah karyawan 8 orang dengan unit usaha sebanyak 2 unit, pada kategori ini BUMDes umumnya sudah memiliki profit dengan nilai rata-rata Rp 2,5 juta pertahun. Sedangkan desa-desanya dengan tingkat perkembangan BUMDes yang tinggi memiliki ciri-ciri diantaranya: (a) telah berdiri lebih dari 5 tahun; (b) memiliki jumlah karyawan rata-rata 9 orang; (c) memiliki lebih dari 2 unit usaha dan; (d) memiliki rata-rata profil lebih dari Rp 5 juta per tahun.

Tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang yang semakin tinggi menunjukkan sebuah keberhasilan BUMDes. Keberhasilan tersebut diperoleh desa-desanya yang mampu mengelola orgainisasi dengan baik serta mampu menyelesaikan setiap kendala dengan baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Murwadi *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan dari BUMDes-BUMDes ini disebabkan karena organisasi tersebut mampu menyelesaikan berbagai hambatan baik hambatan kinerja maupun hambatan keuangan. Hambatan kinerja berkaitan dengan keterampilan sumber daya manusia dalam manajemen organisasi. Sedangkan hambatan keuangan berkaitan dengan potensi-potensi penyalahgunaan anggaran BUMDes. Faktor-faktor pendorong kinerja BUMDes adalah keterampilan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan integritas yang dimiliki oleh pengurus BUMDes (Sofyani *et al.*, 2019).



Gambar 6. Peta sebaran tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi karakteristik dan analisis tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap desa memiliki produk unggulan desa yang dapat digunakan untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi perdesaan. Sebagian besar produk unggulan yang dimiliki oleh setiap desa-desa di Kabupaten Pandeglang bergantung pada sumber daya alam. Potensi inilah yang kemudian menjadi dasar setiap desa untuk mengembangkan BUMDes. Secara umum karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang memiliki organisasi yang telah dijalankan berusia 4 tahun. Jumlah karyawan yang dimiliki antara 4 hingga 12 orang disetiap BUMDes. Unit usaha yang dijalankan didominasi oleh usaha perdagangan, dan usaha-usaha tersebut telah menghasilkan keuntungan hingga mampu memberikan sumbangan terhadap PADes. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan BUMDes maka semakin lama organisasi tersebut dijalankan; semakin banyak jumlah karyawan, unit usaha, modal, profit omset dan sumbangan terhadap PADes; serta semakin bervariasi jenis usaha yang dimiliki.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pembangunan desa. Pertama, pemerintah Kabupaten Pandeglang, masih diperlukan optimalisasi pengelolaan BUMDes dengan pendampingan usaha yang melibatkan akademisi, swasta, media dan pemerintah. Pelatihan dan pendampingan BUMDes diperlukan utamanya untuk mewujudkan diversifikasi unit usaha BUMDes. Kedua, diperlukan penguatan Kerjasama antar BUMDes dengan membentuk BUMDes Bersama khususnya pada desa-desa yang memiliki karakteristik yang sama. Sehingga dapat tercapai skala ekonomi yang maksimal dan jangkauan pemasaran produk unggulan yang lebih luas.

REFERENSI

- Abdurrohman, Fuad Salam, A., Fitrianiingsih, D., Riyanto, I., & Taufik, M. A. E. (2020). Manajemen Bisnis Bagi Pengelola BUMDes Kabupaten Pandeglang. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 30–35. <https://doi.org/10.30656/ka.v3i1.2578>
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Budiharsono, S. (2018). *Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan* (B. Nugraha (ed.); 1st ed.). IPB Press.
- Candraningsih, K. E., Sarayanti, K. Y., Pratiwi, P. R., Suryantini, L. P., Juliantari, I. G. A. D., & Devilaksmi, A. T. (2019). Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 24–32. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19858>
- Comission., O.-J. E. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide*. OECD Publishing.
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Faradis, R., & Afifah, U. N. (2019). Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 33–55. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i1.1108>
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan laju Urbanisas. *WIDYATECH Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(3), 61–72.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, III(2), 105–117. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhkwv>
- Hidayah, U. (2019). Sinergisitas BUMDes dan UMKM Alas Kaki di Desa Pagelaran dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Institut Pertanian Bogor.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Periode 2015-2018. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 144–153. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i2.676>
- Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 1 (2021).
- Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna. (2017). BUMDes sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(1), 1–18. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>
- Muta'ali, L. (2016). *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Prespektif Keruangan)*. Badan penerbit Fakultas Geografi (BPFGE-UGM).
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah (Prespektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. LP3SE.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *JSEK: Jurnal Ekonomi Dam Studi Kebijakan*, 01(01), 14–23. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/jesk/article/view/3429>
- Prasetyo, D. (2019). *Peran Bumdes dalam Membangun Desa*. Derwati Press.
- Putri, E., Sariyoga, S., & Wibowo, A. S. (2019). Daya Saing Sektor Pertanian Tanaman Pangan Di Provinsi Banten. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 12(1), 87–100. <https://doi.org/10.33512/jat.v12i1.5537>

- Rahman, A., Nurlela, N., & Rifal, R. (2020). Pengarusutamaan Modal Sosial Dalam Pembangunan Perdesaan. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1897>
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58. <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Sumantri, A. T., Hermita, N., Riyanto, R. A., & Mulyaningsih, A. (2021). Ketersediaan Sumberdaya Lahan Dan Aksesibilitas Dalam Upaya Mendukung Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 98–114. <https://doi.org/10.33512/jat.v14i1.11461>
- Wahyundaria, D. A., & Sunarta, I. N. (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Cunggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 225–233.
- Wahyuni, E. S., Firdaus, M., & Baga, L. M. M. (2018). Strategi Alokasi Anggaran Sektor Pertanian Untuk Mempercepat Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(April), 14–23. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i.22691
- Wahyuningtyas, I. K. (2021). Peran Strategis Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jendela Inovasi Daerah Daerah*, 4(1), 91–101. <http://jurnal.magelangkota.go.id/index.php/cendelainovasi/article/view/95>